



Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

Melinawati¹, Erlangga Ramadhan², Syaiful Zuhri Rangkuti³, Rita Anggriani⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: melinawati888@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Medan Sumatera Utara, Medan, Email: erlnggrmdhn@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: syaiful7rangkuti@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: ritaanggriani@yahoo.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Pendapatan, Belanja, Daerah

ABSTRACT

Law Number 23 of 2014 concerning Autonomous Regions. Regency/City DPRD carries out several functions, one of which is the budget function where the DPRD manages regional control debates over Regency/City APBD projects. The audit function is also carried out by the DPRD, in this case the inspection of the Regency City Review and the Regency/City Fund Review of the APBD. The aim of this research is to find out the DPRD's discussion regarding the 2020 Coal APBD procedures as well as the DPRD's approval form for the 2020 Batu Bara Regency APBD draft proposed by the Batu Bara Regency Government. The DPRD's authority to discuss and ratify the RAPBD in the provinces under it is based on Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Cash Management, which reads: "(1) PPK-SKPD prepares regional finances. SKPD report for the budget year concerned and submitted to the Regent via PPKD no later than 2 (two) months after the end of the budget year. (2) The financial report as intended in paragraph (1) must be submitted to PPKD as a basis for preparing financial reports for the public government. One of its duties and authorities is to direct the implementation of regional regulations and APBD in accordance with Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, Article 154. The aim is to create an efficient, clean and independent government, free from various practices that indicate corruption, collusion and nepotism (KKN). Law Number 23 of 2014 concerning Autonomous Regions. Regency/City DPRD carries out several functions, one of which is the budget function where the DPRD manages regional control debates over Regency/City APBD projects. The audit function is also carried out by the DPRD, in this case the inspection of the Regency City Review and the Regency/City Fund Review of the APBD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonom. DPRD Kabupaten/Kota menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran dimana DPRD mengelola perdebatan penguasaan daerah atas proyek APBD Kabupaten/Kota. Fungsi audit juga dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah pemeriksaan Tinjauan Kota Kabupaten serta Tinjauan Dana Kabupaten/Kota atas APBD. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembahasan DPRD Tentang Tata Cara APBD Batu Bara Pada Tahun 2020 serta formulir persetujuan DPRD Terhadap rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. kewenangan DPRD untuk membahas dan mengesahkan RAPBD di provinsi yang berada di bawahnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kas Daerah, yang berbunyi: "(1) PPK-SKPD menyiapkan keuangan daerah. laporan SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah publik. Salah satu tugas dan

wewenangnya adalah mengarahkan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 154. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang efisien, bersih, dan mandiri, bebas dari berbagai praktik yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonom. DPRD Kabupaten/Kota menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran dimana DPRD mengelola perdebatan penguasaan daerah atas proyek APBD Kabupaten/Kota. Fungsi audit juga dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah pemeriksaan Tinjauan Kota Kabupaten serta Tinjauan Dana Kabupaten/Kota atas APBD.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Sistem hukum yang ada di Indonesia, hal ini diatur dengan undang-undang yang dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab. Sebagai administrasi publik di Indonesia, itu didasarkan pada hukum Indonesia. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan pemerintahan dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam undang-undang yang ada, yang disebut desentralisasi, yang merupakan bentuk toleransi pusat terhadap daerah, untuk melimpahkan semua urusan ekonomi daerah kepada pemerintah daerah.

Selama ini otonomi daerah menjadi jantung pelaksanaan desentralisasi pemerintah.¹ Bahkan, konsep otonomi daerah mengandaikan adanya kebebasan daerah untuk membuat keputusan politik dan administratif sesuai dengan proyek mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentingan kemandirian daerah, tidak boleh ada campur tangan pemerintah pusat.²

Salah satu bentuk toleransi pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi dalam pengelolaan APBD adalah dalam hal penyiapan proyek. Sementara itu, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah secara langsung mengumumkan peraturan perundang-undangan yang disahkan pada 6 Maret 2019, di mana Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah No. Art. 293 dan 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu sendiri. Oleh karena itu, menurut UU n. 23 Tahun 2014 di Pemerintah Provinsi, pasal. 1 Paragraf 4 Dewan Perwakilan Rakyat Nasional adalah organisasi perwakilan rakyat daerah dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri. Dewan Perwakilan Daerah telah dibentuk dalam pengembangan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah ini.

DPRD Kabupaten/Kota adalah badan perwakilan daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan tingkat kabupaten/kota. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang. Salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengarahkan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 154. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang efisien, bersih, dan mandiri, bebas dari berbagai praktik yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonom. DPRD Kabupaten/Kota menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran dimana DPRD mengelola perdebatan penguasaan daerah atas proyek APBD Kabupaten/Kota. Fungsi audit juga dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah pemeriksaan Tinjauan Kota Kabupaten serta Tinjauan Dana Kabupaten/Kota atas APBD.

¹ Iqbal Irawan Dany Try Hutama Hutabarat, Nurhaliza Rambe, Erra Ayu, Pandu Andrian, Fikri Ersa, Dicky Arya, Cecep Sujati, Muhammad Bintang, Ilham Arya, Juheri Amri, Gilang Opri, Nanda Pratama, "Gambaran, Pengaruh, Dan Kedudukan Demokrasi Indonesia Di Era Modern Dalam Sudut Pandang Masyarakat," *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, no. 1 (2022): 436-41.

² Djohermansyah Djohan, *Potret Para Duta Besar Daerah Dan Masyarakat Setempat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa, 2007), hlm. 7

³ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 1

Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Untuk kebijakan ekonomi daerah umum dan prioritas kamar ekonomi sementara (KUA PPAS);
2. Rencana kerja dan anggaran RKA SKPD Kain; dan
3. Proyek Penyimpanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD).

Kewenangan DPRD untuk membahas dan mengesahkan RAPBD di provinsi yang berada di bawahnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kas Daerah, yang berbunyi: “(1) PPK-SKPD menyiapkan keuangan daerah. laporan SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah publik.

Dilihat dari keadaan wilayahnya, Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang pendapatan daerahnya antara lain berasal dari pariwisata dan industri. Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kota yang menerapkan sistem pemerintahan daerah sendiri.⁴ Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri, Kabupaten Batu Bara membutuhkan anggaran untuk menjalankan pemerintahannya. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 cukup besar. Berkenaan dengan nilai dampak peruntukan ekonomi.⁵

Adapun dalam hal ini suatu pendapatn dasaerah ialah memiliki suatu konsep di dalam otonomi. Keuangan di daerah yang mana merupakan suatu sumber pendapatan di daerah yang dapat bertujuan untuk memberikan suatu peningkatan dan juga suatu kemampuan terhadap keuangan daerah. Sehingga nantinya di daerah tersebut tidak lagi bergantung hanya mengandalkan dari bantuan Pemerintah Pusat. Maka dalam hal ini pula, apabila Pemerintah Pusat yang sudah memberikan keleluasaan terhadap daerah untuk menggali dan juga melakukan suatu perluasan.

Suatu pengeluaran yang nantinya akan diterima kembali, demi baik suatu anggaran yang dalam hal ini pada tahun yang bersangkutan maupun ada pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Adapun dalam hal ini APBD, merupakan suatu rencana keuangan yang telah dilakukan pembuatan oleh Pemerintah Daerah.

Pengelolaan dan juga melakukan suatu tanggungjawab atas keuangan Pemerintah Daerah. Mengenai hal ini, pemeriksaan yang dimaksudkan ialah meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta adanya pemeriksaan atas tujuan tertentu.

Pengeluaran di dalam Pemerintah, agar dapat dilakukan pembelanjaan demi untuk dapat dilakukan suatu pertanggungjawaban terhadap publik.⁶ Maka untuk itu, dengan didasari pada anggaran yang telah dirancang, maka dengan sedemikian rupa halnya dapat menjadi suatu pengendali keuangan di daerah. Mengenai hal ini suatu anggaran yang nantinya akan mampu untuk dikendalikan di dalam suatu pengeluaran yang dengan cepat, maka nantinya akan dapat menghindari terjadinya suatu pemborosan dimana suatu pengeluaran yang tidak dapat lagi bermanfaat.

Oleh karena itu, dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengendalian daerah, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dipatuhi sehingga peneliti yang mengkaji untuk meningkatkan judul penelitian ini dalam penelitian hukum harus terampil. Oleh karena

⁴ Emmi Rahmawita Nasution Dany Try Utama Hutabarat, Khairida, “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai),” *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 23, no. 1 (2022): 1–13.

⁵batubara; https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batu_Bara, dan dipertahankan hingga 1 Maret 2022, 7:30 a

⁶ Khomaidi Hambali Siambaton, eriKuswoyo, Rahmat, Komis Simanjuntak, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja,” *EX-OfficioLawReview* 01, no. 01 (2022): 26–37.

itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan dan melakukan penelitian hukum yang dilatarbelakangi dengan tinjauan hukum terhadap pembahasan konstitusi daerah, sesuai dengan uraian dalam konteks yang diuraikan dan dipaparkan dalam penelitian hukum ini. Batubara Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Batubara Tahun 2020 (Studi di DPRD Kabupaten Batu Bara)

Metode

Metode penelitian ilmiah adalah metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data. Metode ilmiah mengacu pada kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian menawarkan prosedur dan kondisi yang paling ketat⁷. Dengan kata lain, metode penelitian tidak hanya membuat pengetahuan yang objektif dan benar seluas mungkin, tetapi juga melestarikan pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang hebat.

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitiannya adalah empiris, mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan.

Hasil Penelitian

Pembahasan DPRD Tentang Tata Cara APBD Batu Bara Tahun 2020

penatausahaan pendapatan daerah dan belanja fiskal (APBD) Kabupaten Batu Bara dalam penatausahaan pendapatan daerah dan belanja fiskal di Kabupaten Batu Bara, system sheet pelaksanaan APBD Tahun 2020. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara didasarkan pada konsep pengelolaan APBD tahun 2020. Dalam hal ini berlaku Pasal 294 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu: “(1) PPK-SKPD menyusun laporan keuangan SKPD tahun anggaran; dan Kepala Daerah tersebut oleh PPKD disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan publik. Tentang Pasal 295 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Perekonomian Daerah, yaitu:

- (1)Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 (1) Daerah diajukan oleh PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat keuangan untuk pelaksanaan anggaran pada SKPD yang menjadi subjeknya.
- (3)Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) sebuah. laporan pelaksanaan anggaran;
 - b) neraca; dan
 - c) laporan keuangan tahunan.
- (4)Pernyataan kepala SKPD dilampirkan pada laporan keuangan SKPD sesuai dengan ayat (1) penatausahaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya dilakukan secara wajar.
- (5)Bentuk surat perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran E.XXII Peraturan Menteri ini.

Sedangkan untuk DPRD Kabupaten Batu Bara, sistem mengembangkan sistem anggaran untuk upaya pengelolaan awal APBD. Pada setiap tahun 2019, sistem akuntansi diperkenalkan dalam pengelolaan APBD.⁸Terkait pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan APBD tahun 2019.

Tentang tugas DPRD Kabupaten Batu Bara dalam memenuhi tugasnya dalam pengelolaan rencana APBD di Kabupaten Batu Bara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹Dalam hal ini, faktor-faktor yang mendukung sistem dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

- a. Dewan;
- b. Penilaian;

⁷Hadari Nawawi, *Social Research Methods*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985), p. 25

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

- c. Sumber Daya Manusia
- d. Teknis; dan
- e. Koordinasi.¹⁰

Faktor pendukung lainnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sesuai Tupoksinya Kabupaten Batu Bara.¹¹ Namun dalam hal ini terdapat alasan yang menghalangi tanggung jawab Badan Daerah Kabupaten Batu Bara untuk merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

PBD disusun untuk tahun anggaran 2020 dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomi, transparansi dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan, kewajaran, dan kemanfaatan masyarakat.¹² Dalam hal ini kinerja penjualan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan kinerja 4 (empat) tahun ke depan yang rata-rata dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pendapatan daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020 hanya tercapai 87,62% atau Rp 647.693.996.205,82 dari target yang telah ditetapkan. Kinerja penerimaan tersebut masih menunjukkan tren yang cukup baik dengan peningkatan penerimaan yang bervariasi tergantung pada sumber daya ekonomi daerah dan pusat.¹³

Target penerimaan Kabupaten Batubara tahun 2020 pada tahun 2020 diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Surat Perintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dana kompensasi Rp 575.157.355.000,00 dan pajak daerah lainnya yang sah Rp 57.542.365.188,00. Dalam hal ini, pendapatan daerah (PAD) perhitungan daerah untuk tahun anggaran 2020 ditentukan karena pelaksanaan pendapatan asli daerah (PAD) perhitungan wilayah Tahun 2020 sebesar Rp 63.728.887.1666,82.

Tabel 1.
Kabupaten Batubara 2020 telah memulai akuisisi

No	Nama Pendapatan Daerah	Kinerja (RP)	Sasaran (RP)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	16.160.983.824.18	16.317.000.000,00	99,04
2.	keseimbangan daerah	22.127.197895.99	48.865.433.575,00	45.28
3.	Masalah pengelolaan sumber daya regional	7.206.780.460,00	7.000.000.000,00	102,95
4.	Baca resep lokal dan resep lainnya	18.233.924.986,65	34.315.088.883.00	53.14

Sumber: DPRD Kabupaten Batu Bara¹⁴

Adapun pencapaian pendapatan asli daerah, ada beberapa sumber yang belum mencapai tujuan remunerasi daerah yaitu tujuan remunerasi pelayanan kesehatan rumah sakit umum yang selama ini tercapai. 47,28% atau Rp 20022.961.425,00 menargetkan Rp 42.348.912.175,00. Hal ini disebabkan minimnya masyarakat yang bisa berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah di daerah.

Selain itu, sasaran remunerasi yang tidak mencapai target adalah remunerasi dinas persampahan/kebersihan yang terealisasi sebesar 23,54 persen atau Rp 805.864.523,05 dari target yang dicapai sebesar Rp 3.422.715.000,00. Hal ini dikarenakan alat pengelolaan sampah kompos tidak dapat bekerja, sehingga diharapkan alat pengelolaan sampah tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Rahmat, Zubaidah, Indra Perdana, "Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 61–65.

¹⁴ *Ibid*

Adapun kompensasi daerah untuk penggantian biaya kertas cetak untuk pengiriman kertas dasar tercapai 0,92% atau Rp 17.100.000 dari target Rp. 1.867.046.400.00. Sedangkan pendapatan asli daerah lainnya hanya mencapai 53,14%.¹⁵

Menurut persentase pendapatan lokal, perhitungan wilayah sangat rendah, hal ini disebabkan penerimaan deposit visa, permohonan kompensasi daerah, pendapatan lain-lain yang berasal dari daerah. Penerimaan lain yang sah dan daerah dari Dana Kapitasi JKN adalah dihitung berdasarkan wilayah. Selain itu, objek aslinya perhitungan pendapatan daerah kabupaten keduadari hasil penjualan beras untuk warga miskin (Raskin), Rp. 2.155.668.000,00, penerimaan pajak daerah-daerah.¹⁶

a. Saldo Pendapatan Dana

Pemberitahuan regional penghitungan wilayah dari saldo dana perhitungan wilayah 575.157.355.000,00.

Tabel 2.
Dari Dana Perimbangan Kabupaten Pada Batubara 2020

No	Nama penghasilan adalah saldo dana	Kinerja (RP)	Sasaran (RP)	%
1.	Pemerataan manfaat pajak / pemerataan manfaat pajak	18.617.710.087,00	32.124.012.000,00	57,96
2.	Alokasi umum dana	446.820.629.000.000,00	446.820.629.000.000,00	100,00
3.	dana perwalian	82.010.647.886,00	96.212.714,000,00	85,24

Sumber: DPRD Kabupaten Batu Bara.¹⁷

b. Pajak Daerah Lainnya Yang Sah

Pendapatan daerah dari sumber lain yang diklaim Rp 57.542.365.188,00 menjadi Rp 36.516.025.064 atau 63,46%. Sedangkan penerimaan daerah lainnya yang sah dari dana penyertaan pajak pemerintah provinsi dan daerah lainnya yang ditargetkan sebesar Rp 38.254.365.188,00 menjadi Rp 36.516.025.064 atau 95,46%.¹⁸

Kemudian muncul pertanyaan tentang pengeluaran daerah wilayah batubara pada tahun 2020 yang dananya sebesar Rp. 868.435.559.646.00 diinvestasikan dengan realisasi Rp. 667.207.447.546,55 atau 76,83%, terdiri dari biaya tidak langsung Rp% dari target Rp. 6,51% dari Rp 337.143,2% target Rp. Itu¹⁹ distribusi biaya tidak langsung dalam perhitungan wilayah tahun 2020 untuk alokasi dana belanja yaitu;

Tabel 3.
perincian tidak langsung Kabupaten Batubara untuk tahun 2020

No	Nama pembelian tidak langsung	Sasaran (RP)	Kinerja (RP)	%
1.	Pekerja	330 175 079 128.00	302.157.783.471.00	91,51
2.	Manfaatkan banyak pekerjaan rumah	1.265.383,246	-	-
3.	Pendirian cabang/dukungan	9,601,400,0000.00	9.386.200.000.00	97,76
4.	kesejahteraan	15.917.500.000.000,00	15.318.506.000,00	96,24
5.	Asisten Keuangan	588,131,579.00	568.047.614.00	96,59
6.	tidak terduga	3.200.000.000,00	2.633.886.193	82,30

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Sumber: DPRD Kabupaten Batu Bara.²⁰

Distribusi belanja langsung diperhitungan wilayah tahun 2020 untuk alokasi dana yaitu;

Tabel 4.

Kabupaten Batu Bara langsung memiliki tabel breakdown di 2020

No	Pembelian yang benar adalah namanya	Sasaran (RP)	Kinerja (RP)	%
1.	pekerja	15.282.814.888.00	13.382.996.825.00	87.57
2.	Barang dan jasa	251.491.018.550.00	222.184.938.750.03	88.35
3.	kota pertama	240.914.232.331.00	101.575.289.695.52	42.16

Sumber: DPRD Kabupaten Batu Bara²¹

Mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib pajak diperhitungan wilayah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Daerah Pendidikan

Atas dasar pelayanan dasar yang diperlukan negara, pemerintah menghitung bahwa kabupaten menginvestasikan uangnya di bidang pendidikan pada tahun 2020 sebesar Rp 37.203.185.760,00.

2) Keamanan Wilayah

Negara membutuhkan pelayanan dasar pemerintah untuk menghitung jumlah uang yang diinvestasikan di bidang kesehatan pada tahun 2020 sebesar Rp 206.005.551.282,00 dengan pengaruh sebesar Rp 53.971.623, 746,48 atau 26,20%.

3) Pekerjaan Umum Dan Perencanaan Penggunaan Lahan

Atas dasar pelayanan dasar yang diperlukan negara, pemerintah Kabupaten pada tahun 2020 menginvestasikan uang di bidang Pekerjaan Umum dan Pembangunan Pedesaan sebesar Rp 62.955.921.719,00.

4) Perumahan Umum Dan Kawasan Pemukiman

Negara bagian diperlukan kontrol layanan dasar daerah perhitungan Alokasi dana di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 sebesar Rp 24.980, 366.000,00.

5) Bidang Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Layanan dasar publik yang diperlukan pemerintah menghitung distrik menginvestasikan uang di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp. 10.826.005.085.00 atau 97,38%.

6) Bisnis Sosial

Pemerintah membutuhkan layanan dasar, pemerintah menghitung alokasi dana di bidang sosial tahun 2020 sebesar Rp. 16.514.447.822.00, yaitu 97,85%.²²

Tunduk pada ini, pemerintah negara bagian telah menetapkan sebuah daerah anggaran tahun 2020 menurut bidangnya, yaitu:

1) Pekerjaan Negara

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian memiliki menghitung luasan menginvestasikan uang di bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.802.527.260.00, dengan pengertian bahwa jumlah uang adalah Rp. 2.794.023.176,00 atau 99,70%.

2) Kepemilikan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian menghitung alokasi dana di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020.

3) Tempat Makan

Dalam hal wajib, pemerintah publik menghitung alokasi dana di bidang pangan tahun 2020 sebesar Rp 235.144.000,00 dengan pemenuhan sebesar Rp 234.744.000,00 atau 99,83%.

4) Sektor Lingkungan

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian menghitung luas menginvestasikan uang di lingkungan tahun 2020 sebesar Rp 21.408.691, 499,00 dengan catatan jumlah uang sebesar Rp 19.194.319.699,90 yaitu 89,66%.

5) Kependudukan Dan Administrasi Negara Sipil

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian menghitung distrik menginvestasikan uang di bidang kependudukan dan manajemen pribadi pada tahun 2020 sebesar Rp 3.211.543.000,00, dengan catatan jumlah uang sebesar Rp. 3.050.292.399,00 atau 94,98%.

6) Bidang Pemberdayaan Kota dan Desa

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian menghitung alokasi dana di bidang Pemberdayaan Kotamadya dan Desa Tahun 2020 sebesar Rp 1.772.515.000,00 padahal diketahui jumlah uang sebesar Rp. 1.745.520.890,00 atau 98,48%.

7) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian menghitung alokasi dana di bidang kependudukan.

8) Daerah Transportasi

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian telah mengalokasikan daerah 2.093.640.885,00 dana transportasi tahun 2020.

9) Komunikasi dan TI

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian menghitung alokasi dana bidang komunikasi dan informatika tahun 2020 sebesar Rp. 4.660.421.791,00 atau 97,72%.

10) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian wilayah batubara melakukan investasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) 2020 sebesar Rp. 1.604.006.10,00 sehubungan dengan Rp. 1.566.141.158,00 atau 97,64%.

11) Sektor Investasi

Perkembangan sektor investasi pada tahun 2012 di sektor batubara adalah diwujudkan dalam kegiatan yang menghasilkan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi investasi dan pameran investasi.

12) Pemuda Dan Olahraga

Dalam hal wajib, Pemerintah Negara Bagian menghitung bahwa daerah menanamkan Uang Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 sebesar Rp 2.802.527.260,00.

13) Budaya

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian menghitung bahwa kabupaten akan menginvestasikan uang di sektor pertanian pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp 793.520.000,00 dengan total pembayaran keuangan yang diselesaikan sebesar Rp 783.204.200,00 atau 98,70%.

14) Bidang Perpustakaan

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian menghitung bahwa kabupaten akan menginvestasikan uang di bidang perpustakaan pada tahun 2020.

15) Bidang Arsip

Dalam hal wajib, pemerintah negara bagian menghitung luas akan menginvestasikan uang di kawasan arsip pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.000.000,00.²³

Ketika pemilihan berlangsung, pemerintah menghitung luas pada tahun 2020 anggaran menurut bidang yaitu :

1) Wilayah laut dan perikanan

Dalam pemilu yang berada di bawah yurisdiksi negara, distrik batubara pada tahun 2020 berinvestasi di industri kelautan dan perikanan sebesar Rp. 2.704.225.000,00.

2) Pariwisata

Dalam pemilu yang berada di bawah yurisdiksi negara, perhitungan luas alokasi dana sektor pariwisata tahun 2020 sebesar Rp 361.970.000,00 terhadap Rp. 360.176.200,00 atau 99,50%.

²³ *Ibid*

3) Pertanian

Dalam pemilu yang berada di bawah yurisdiksi negara, perhitungan kabupaten Alokasi dana di bidang pertanian tahun 2020 sebesar Rp 3.453.559.000,00 dengan kinerja keuangan sebesar Rp. 3.106.851.837,00 atau 89,96%.

4) Kawasan Komersial

Dalam pemilu yang berada di bawah yurisdiksi negara, perhitungan kabupaten Alokasi Dana di Sektor Perdagangan Tahun 2020 sebesar Rp. 4.250.468.950,00.

5) Sektor Industri

Dalam pemilu yang berada di bawah yurisdiksi negara, distrik batubara menginvestasikan uang di bidang industri pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.040.500.000,00 dengan hasil yaitu dengan nilai keuangan sebesar Rp 2.010.573.020,00 atau 98,53%.²⁴

Dipemerintahan negara bagian luas perhitungan ditahun 2020, anggaran menurut bidangnya, yaitu:

1) Administrasi Pemerintah

Dalam hal pemerintahan, daerah menghitung Alokasi dana bidang administrasi pada tahun 2020 dari Rp 2.046.990.000 menjadi Rp 1.720.393.482,00 atau 84,05%.

2) Dilapangan

Menjalankan urusan pemerintah daerah perhitungan, kabupaten akan menginvestasikan uang pada tahun 2020 di daerah pemantauan, yaitu mencapai Rp 2.046.990.000,00 dengan Rp 1.720.393.482,00 atau 84,05%.

3) Perencanaan Sektor

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, wilayah batubara Alokasi dana dalam rencana sektor 2020 sebesar Rp 3.718.793.883,00 mencapai Rp 3.475.508.700,00 atau 93,46%.

4) Sektor Keuangan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, distrik batubara menginvestasikan uang untuk pemerintah daerah pada tahun 2012. 6.427.873.989,00 atau 94,41%.

5) Bidang Pekerjaan

Pertanyaan dalam administrasi pemerintahan sendiri lokal dari distrik batubara menginvestasikan uang pada tahun 2020 untuk mempekerjakan staf sebesar Rp 3.041.965.000,00 mencapai Rp. 2.631.011.854,00 atau 86,49%.²⁵

Formulir Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Yang Diajukan Pemerintah Kabupaten Batu Bara

Keterbatasan kinerja ekonomi dari pendapatan asli daerah dalam memperoleh perekonomian di Kabupaten Batu Bara. sering dimasukkan dalam anggaran untuk pelaksanaan laporan APBD Kabupaten Batu Bara di antaranya, jika ada, pemerintah teknis dari negara sering datang terlambat, yang merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengelolaan ekonomi daerah.²⁶

Kendala lain adalah sumber daya manusia, yang seringkali kekurangan staf yang dibutuhkan. Kemudian, karena kurangnya SDM yang ada, maka SDM yang ada dapat melakukan lebih dari satu tugas. Sarana dan Prasarana Keterbatasan kedua adalah kurangnya sumber daya informasi di departemen perencanaan.²⁷ Infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi salah satu kendala dalam melakukan audit yang dilakukan di Kabupaten Batu Bara karena masalah jaringan internet untuk melaksanakan program-program yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.²⁸ Dalam hal ini kendala lain adalah komunikasi, dimana kurangnya koordinasi antar domain dan juga antar SKPD menjadi alasan kejelasan ruang lingkup dan tujuan proyek harus dikomunikasikan dengan baik kepada media. Konsistensi atau konsistensi desain dasar dan tujuan harus dikomunikasikan sehingga pelaksana

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Zaid Afif and Dany Try Utama Hutabarat, "State Organization Structure Based on Duties and Positions of Tanjungbalai City DPRD," *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan* 1, no. 1 (2019): 260–70.

²⁸ *Ibid*

mengetahui ruang lingkup dan tujuan proyek pembangunan yang ditetapkan. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses yang sangat kompleks dan kompleks. Informasi yang berbeda dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda. Untuk implementasi yang efektif, siapapun yang terlibat dalam keputusan implementasi harus mengetahui apakah implementasi itu mungkin.²⁹

Sayangnya, kendala berasal dari ketidakmampuan untuk menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat dari kegiatan tersebut. Pada dasarnya anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari kegiatan pemerintah.³⁰ Pada dasarnya anggaran yang berguna dan realistis tidak hanya membantu karyawan mengembangkan pekerjaannya, tetapi juga mengembangkan cara dan mengetahui rencana. Tetapi juga dapat meningkatkan keselarasan tujuan bisnis antara manajer dan bawahannya. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya keuangan. Hal ini untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan APBD yang dihasilkan efisien, tepat sasaran dan dapat diandalkan. Fungsi administrasi dalam hal ini ibukota daerah juga harus didukung dengan ketersediaan anggaran. Menurut daftar ini berkaitan dengan teori³¹

Didominasi oleh item baris dan pembuatan anggaran tambahan, pembuatan anggaran hanya didasarkan pada tingkat penyelesaian keuangan tahun sebelumnya. Pada dasarnya performance budgeting adalah proses pelaksanaan dan pengelolaan anggaran daerah yang dirancang untuk mencapai hasil operasional. Kementerian harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi tugas kantor, yaitu mengatur kebaikan bersama.

Analisis keselarasan belanja daerah biasanya menunjukkan bahwa belanja operasional mendominasi sebagai proporsi dari total belanja daerah, berkisar antara 60-90%, dan belanja modal sebagai proporsi dari total belanja. Luasnya antara 5 sampai 20% (Mahmudi: 2010). Secara umum, analisis kesepakatan belanja daerah menunjukkan bahwa sebagian besar dana belanja daerah digunakan untuk belanja operasional dan hanya beberapa persen untuk belanja modal. Selama periode 2011-2015, rata-rata beban usaha sebesar 76,95%, sedangkan beban modal sebesar 19,64%. Hal ini juga berarti bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa dengan pendapatan tertinggi.

Sewa tanah adalah biaya/biaya perolehan/pembelian/pembentukan kemerdekaan, pemindahan hak milik dan sewa menyewa, pelepasan, Peralatan, jatuh tempo tanah, sertifikat pendirian dan pengeluaran-pengeluaran lain yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang bersangkutan dalam keadaan siap.

Penelitian peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya perolehan/pengisian kembali/penyimpanan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang akan memberikan keuntungan lebih dari 12 bulan.

Penelitian bangunan gedung dan gedung adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/pemugaran dan termasuk biaya untuk menyelenggarakan, memantau dan mengelola pembangunan gedung dan gedung yang menambah daya tampung sampai dengan gedung dan gedung yang bersangkutan dalam kondisi yang bermanfaat.

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk menambah/menambah/memulihkan dan meningkatkan pembangunan/pembuatan dan pemeliharaan, termasuk biaya perencanaan, pemantauan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang melebihi kapasitas jalan.

Investasi berwujud lainnya adalah pengeluaran/biaya untuk memperoleh/menambah/mengganti/meningkatkan/membangun/memproduksi dan memelihara aset berwujud lainnya yang tidak dapat dialokasikan untuk kriteria investasi tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, termasuk jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal untuk kontrak dan pembelian, pembelian karya seni, properti arkeologi dan museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku dan jurnal ilmiah.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Hal ini diwajibkan oleh undang-undang, yang tidak dapat dihindari bagi mereka yang harus membayar pajak, dan dapat dipaksakan dengan paksaan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak. Pemberian jasa atau penerbitan izin-izin tertentu yang secara khusus diberikan dan diberikan, termasuk kepada instansi-instansi setempat untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Pendapatan tersendiri tersebut berupa hasil pengelolaan daerah secara individu yang terdiri dari sebagian pendapatan dalam penyertaan modal, atau seringkali untuk kepentingan perusahaan daerah.

Dirancang dan digunakan untuk mendukung biaya produksi perusahaan atau lembaga tertentu agar harga penjualan atau produksi barang publik terjangkau. Niat untuk memberi demi kepentingan pihak lain, biasanya dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Didirikan untuk membina komunitas untuk kemajuan komunitas. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi dana pendapatan dan sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Desa atau pemerintah daerah kepada pemerintah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk penjualan barang yang paling umum dilakukan oleh pemerintah daerah selalu kerjasama dengan pihak ketiga. Pendapatan rumah tangga diperoleh dari pengeluaran dalam bentuk subsidi dari rekening cadangan di kas umum negara.

Daerah dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah dapat menerima dana dari dana perwalian untuk meningkatkan pelayanan kota di bidang pendidikan dan kesehatan.

Adopsi/penambahan/substitusi dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin tersebut selesai dibangun. Pengadaan/suplemen/substitusi dan termasuk biaya untuk rancang bangun, pengawasan dan pengendalian pembangunan gedung dan fasilitas gedung sampai dengan gedung dan gedung tersebut siap pakai. Rencana penambahan/penggantian/perbaikan meliputi pembangunan dan pemeliharaan serta biaya untuk desain, pemantauan dan pengelolaan jaringan irigasi jalan yang meningkatkan kapasitas sampai rencana jalan, sistem irigasi dan jaringan selesai. Untuk daerah tertentu yang memenuhi kriteria mendapatkan tambahan dana dari Pusat melalui DAK. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan, yaitu dana perwalian (DAK), untuk memberikan pelayanan publik yang disediakan melalui belanja modal. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana APBN. Dimana Dana Destinasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi isu daerah dan prioritas nasional. Tujuan dari dana perwalian (DAK) adalah untuk membebaskan kotamadya dari biaya tindakan khusus.

Berdasarkan penelitian Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018), Indra Sulistyaningsih dan Haryanto (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Tujuan Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Oleh karena itu diajukan hipotesis kedua, yaitu: H2: Dana kredit di provinsi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dana pemerataan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan anggaran antara negara bagian dan kota. Dana Perimbangan meliputi Dana Umum (DAU) dan Dana Perwalian (DAK) yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh setiap pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana masyarakat. Sedemikian rupa sehingga Caisse Générale d'Allocation (DAU) dan Caisse Spéciale d'Allocation (DAK) memiliki peran yang cukup penting dalam masyarakat lokal.

Pemerintah daerah harus mengontrol belanja daerah dan belanja modal dalam pembangunan daerah ketika pelayanan publik akan diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggunaan aliran pendapatan daerah, termasuk DAU dan DAK. Jika zona simultan meningkatkan DAU dan DAK, Seharusnya berdampak signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018), Indra Sulistyaningsih dan Haryanto (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi Dana Umum dan Dana Khusus berpengaruh positif terhadap belanja kesehatan. Oleh karena itu dihasilkan hipotesis ketiga, yaitu: H3: Penyaluran dana secara umum dan alokasi dana khusus berpengaruh positif.

Kesimpulan

Mengelola anggaran ekonomi dan belanja (APBD) provinsi karbon, ia adalah bagian dari anggaran daerah. Oleh karena itu, dalam penatausahaan pendapatan daerah dan dalam perhitungan APBD provinsi harus dilaksanakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan PDBA, baik sebagai bagian dari administrasi keuangan daerah maupun sebagai bagian dari administrasi keuangan daerah. Proses penganggaran Oleh karena itu, tanggung jawab pelaksanaan APBD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mengelola perekonomian daerah secara tertib, patuh, efisien, ekonomis, selektif dan transparan, dengan tetap menjaga rasa keadilan dan kepatuhan. Tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara bila perlu menyusun laporan keuangan terlebih dahulu dengan rencana pengelolaan APBD, sebagaimana diatur dalam pasal 294 dan 295 peraturan menteri tersebut. Ariovisto 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini, pembatasan dampak ekonomi pajak daerah terhadap pelaksanaan ekonomi di Provinsi Batu Bara sering dijelaskan dalam laporan pelaksanaan PDBA Provinsi Batu Bara, yang jika ada, seringkali memuat informasi teknis dari pemerintah pusat. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Hal lain yang menjadi kendala adalah masalah sumber daya manusia, dimana pekerja seringkali tidak dibutuhkan. Kemudian staf yang ada dapat mengambil lebih dari satu peran karena kurangnya staf yang ada. sarana dan prasarana. Keterbatasan lain adalah kurangnya informasi sumber daya dari layanan perencanaan. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang tidak memadai

Daftar Pustaka

Buku

- Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Al Makka, Harry., David P.E.Saerang, Inggriani Elim. 2015. Analisis Kinerja Belanja Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:Penerbit
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Stanley, W. (2015). Analisis Laporan Realisasi
- Djohan, Djohermansyah, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- F.Palilingan, Anastasia., H. Sabijono, L. Mawikere. 2015. Analisis Kinerja Belanja
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. Akuntansi Sector Publik,
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Edisi 1. Jakarta.
- Hansen & women 2005. Managemen accounting. Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba
- Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni, 1994
- Hesrini, Elly. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor
- Huda, Nimatul, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah. Yogyakarta : UII Press, 2010
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2009. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat,
- Ilmar, Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar : Identitas, 2013
- Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Jurnal

- Afif, Zaid, and Dany Try Utama Hutabarat. "State Organization Structure Based on Duties and Positions of Tanjungbalai City DPRD." *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan* 1, no. 1 (2019): 260–70.
- Dany Try Utama Hutabarat, Nurhaliza Rambe, Erra Ayu, Pandu Andrian, Fikri Ersa, Dicky Arya, Cecep Sujati, Muhammad Bintang, Ilham Arya, Juheri Amri, Gilang Opri, Nanda Pratama, Iqbal Irawan. "Gambaran, Pengaruh, Dan Kedudukan Demokrasi Indonesia Di Era Modern Dalam Sudut Pandang Masyarakat." *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 5, no. 1 (2022): 436–41.
- Emmi Rahmawita Nasution, Dany Try Utama Hutabarat, Khairida. "Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai).”
Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 23, no. 1 (2022): 1–13.

Eri Kuswoyo, Rahmat, Komis Simanjuntak, KhomaidiHambaliSiambaton4). “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.” *EX-OfficioLawReview* 01, no. 01 (2022): 26–37.

Zubaidah, Indra Perdana, Rahmat. “Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 61–65.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara